

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Vaksinasi merupakan salah satu produk kebijakan yang saat ini sedang diupayakan secara optimal oleh pemerintah dalam rangka menekan laju persebaran mata rantai covid-19, upaya ini merupakan salah satu bentuk responsifitas pemerintah Indonesia terhadap kesehatan publik yang saat ini perlu untuk dijadikan skala prioritas utama dalam pelaksanaannya.

Kebijakan (*policy*) pada umumnya adalah solusi atas suatu masalah. Kebijakan seringkali tidak efektif akibat tidak cermat dalam merumuskan masalah. Kebijakan adalah keputusan pemerintah yang mengatur masalah-masalah publik dengan harapan bahwa kebijakan akan menjadi solusi dari masalah tersebut. Namun dalam banyak kasus kebijakan yang ada masih dianggap kurang memadai dan memerlukan berbagai kebijakan atau perbaikan kebijakan. Kebijakan juga mencakup perilaku dan dapat berupa tindakan atau non-tindakan. Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang menarik. Kebijakan juga mengacu pada serangkaian tindakan yang dihasilkan dari proses yang melibatkan hubungan organisasi.

Kebijakan publik pada umumnya merupakan kewenangan pemerintah menjalankan tugas dan fungsinya dalam hubungannya dengan masyarakat dan dunia usaha. Pada dasarnya kebijakan pemerintah untuk mengatur kehidupan rakyat dalam berbagai aspek adalah kebijakan yang ditujukan pada kepentingan

umum (masyarakat). Melalui kebijakan publik tersebut, pemerintah memiliki kekuasaan dan kekuatan hukum untuk mengatur masyarakat sekaligus menegakkan peraturan yang telah ditetapkan. Ini dipaksakan, tetapi sah dan sah karena didasarkan pada peraturan yang jelas. (Mustari, 2015).

Selangkah demi selangkah untuk mencapai tujuan tertentu secara bertahap dan mempengaruhi banyak orang. Kebijakan pemerintah, baik langsung maupun tidak langsung, ditujukan pada makna yang seluas-luasnya (negara, masyarakat yang berbeda posisi, kepentingan publik) dan tercermin dalam berbagai aspek kehidupan publik. Kebijakan pemerintah merupakan semacam respon terhadap isu-isu masyarakat yang menjadi perhatian pemerintah. Kebijakan pemerintah dapat menyiratkan kebijakan negara jika pemerintah yang melakukannya ditujukan kepada pemerintah negara bagian. Kebijakan pemerintah dapat dikategorikan sebagai kebijakan publik jika tujuannya dipahami dari tujuan yang dicapai dan tujuannya adalah publik tidak hanya dari segi negara tetapi juga dari segi sosial dan kepentingan umum (Herabudin, 2016).

Covid-19 yang melanda dunia pada tahun 2020 menimbulkan keadaan darurat di berbagai negara, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 untuk melaksanakan kedaulatan kesehatan masyarakat Covid-19. Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga situasi ekonomi, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat dunia, termasuk Indonesia. Adanya wabah ini menuntut penerapan berbagai kebijakan pemerintah, antara lain

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) terhadap blokade, yang berdampak pada pembatasan kegiatan masyarakat, termasuk kegiatan ekonomi, pendidikan dan sosial lainnya (Gandryani & Hadi, 2021).

Penyebaran Covid-19 sangat cepat, karena begitu banyak masyarakat di Jawa Timur yang terpapar Covid-19 dan meninggal dunia. Korban tewas di Jawa Timur sangat tinggi dari Januari hingga 5 Oktober 2021, dengan 1.206 kasus terkonfirmasi Covid-19 di Jawa Timur. Namun, 1.087 orang telah menyelesaikan karantina atau perawatan di rumah sakit (Hurek, 2021). Dari total 4.895 warga Madura yang positif Covid-19 di Madura saja, 4.181 dinyatakan sembuh, 346 meninggal, dan 368 masih dirawat. Dari empat kabupaten di Madura, Smaneplicity mencatat warga positif Covid-19 terbanyak. Dari data tersebut, total warga Sumenep yang terkonfirmasi positif Covid-19 sebanyak 1.654 orang, yang sembuh 1.535 orang dan meninggal 102 orang. (Mubyarsah, 2021).

Salah satu kebijakan pemerintah yang nyata untuk pencegahan dan pengelolaan COVID-19 adalah penyediaan vaksin oleh para petugas kesehatan. Vaksinasi Covid-19 merupakan bagian penting dari upaya penanganan pandemi Covid-19 secara komprehensif dan terpadu, meliputi aspek preventif penerapan protokol kesehatan: jaga jarak, pakai sabun, cuci tangan, pakai masker (3M), pencegahan Covid-19 19 vaksinasi, dan 3T (Tes, Telusur, Tindak lanjut). Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 bertujuan untuk memutus mata rantai penularan penyakit dan menghentikan penyebaran Covid-19. Vaksin Covid-19 membantu melindungi tubuh dari penyakit Covid-19 dengan cara membangkitkan atau

merangsang kekebalan tertentu di dalam tubuh melalui pemberian vaksin. (Aldilawati & Hidayat, 2021).

Aturan vaksinasi tersebut tertuang dalam peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 18 Tahun 2021 yang disahkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada 28 Mei 2021. Ketentuan ini menggantikan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 dengan beberapa perubahan untuk menyesuaikan dengan situasi dan keadaan saat ini. Aturan baru pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Indonesia adalah sebagai berikut: Penggunaan jenis vaksin Covid-19 yang sama antara program vaksinasi pemerintah dan vaksinasi Gotong-Royong telah disetujui Kementerian Kesehatan. Jenis vaksin Covid-19 untuk program imunisasi dapat diperoleh dari hibah, donasi, atau hadiah dari masyarakat atau negara lain. Vaksin Covid-19 yang dimaksud tidak dapat diperdagangkan dan harus diberi label khusus dengan mata telanjang. Pemerintah menginginkan 182.554.465 orang Indonesia divaksinasi dengan vaksin Covid-19. Vaksin akan diberikan dalam empat tahap pada Maret 2022. Dari total sasaran vaksinasi, 40.349.049 adalah tenaga kesehatan, pegawai negeri sipil, dan lanjut usia. (Azis, 2021).

Upaya pemerintah untuk menyediakan vaksin dipandang sebagai solusi agar masyarakat terhindar dari infeksi COVID-19, namun ada juga yang menerima dan menolak vaksin tersebut. Dari vaksin yang diberikan. Menanggapi kecurigaan dan kekhawatiran masyarakat tentang penggunaan vaksin, pemerintah telah menyatakan bahwa vaksin yang digunakan aman, telah memberikan

persetujuan penggunaan darurat untuk obat *coronovac* yang diproduksi oleh *sinovac*, kemudian sudah ada fatwa majelis ulama Indonesia Nomor 2 tahun 2021 tentang Produk Vaksin Covid-19 yang menyatakan vaksin covid-19 yang diproduksi *sinovac* dan PT Bio Farma hukumnya suci dan halal, selain itu Presiden Joko Widodo telah mengumumkan kalau vaksinasi diberikan secara gratis, dan menyatakan siap menjadi orang pertama yang menerima vaksin (Usman, 2022).

Pada dasarnya vaksinasi merupakan tanggung jawab pemerintah untuk melakukan upaya penanggulangan Covid-19, dan jika ada masyarakat yang menolak vaksinasi maka yang menolak vaksinasi akan mengatasi wabah Covid-19. Dianggap sebagai penghambat pelaksanaan. Dalam hal ini, mereka yang menolak vaksinasi dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000 (Rp1 juta).(Usman, 2022).

Pasal 13 (2) Perpres Nomor 14 Tahun 2021 perubahan Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pengelolaan Vaksinasi Terkait Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 adalah Kementerian Kesehatan. sebagai orang yang divaksinasi Covid-19 berdasarkan data, Anda wajib mematuhi vaksin Covid-19. Sanksi bagi yang menolak vaksinasi termasuk dalam ayat (4), dimana sanksi administratif dikenakan berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan atau dukungan sosial, penundaan atau penghentian sementara pelayanan pemerintah, dan atau denda. (Usman, 2022).

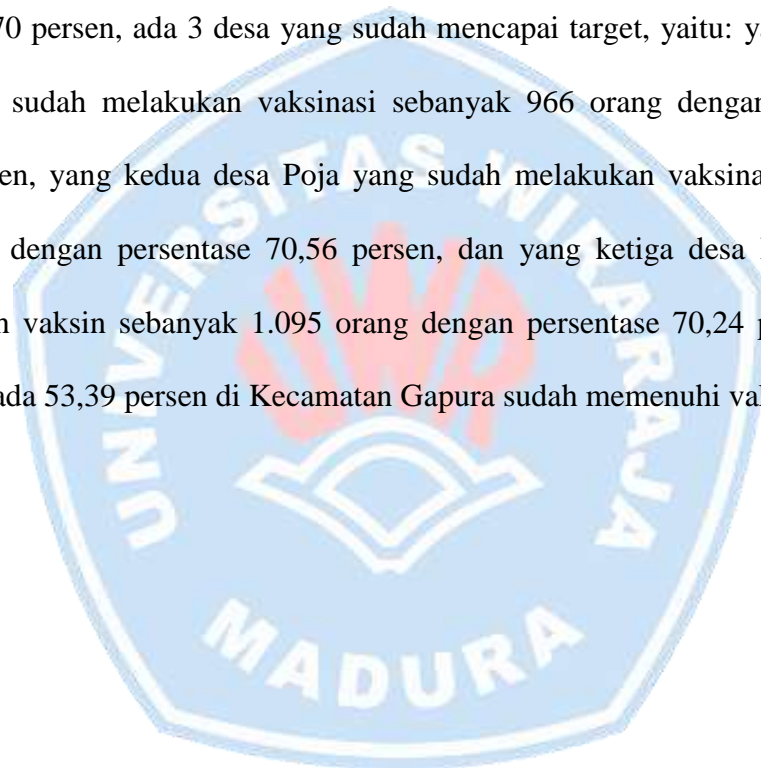
Hanya 21% vaksinasi di Indonesia yang diberikan dua kali dengan vaksin Covid-19 pada 11 Oktober 2021. Indonesia adalah negara terendah ketiga di Asia Tenggara (Jayani, 2021). Vaksin Covid-19 Indonesia mencapai lebih dari 200 juta suntikan pada 4 November 2021. Dari jumlah tersebut, terdapat 123,4 juta penyuntikan pertama, 77,1 juta penyuntikan kedua, dan 1,1 juta penyuntikan ketiga. Dengan demikian, jumlah vaksinasi mencapai 201,6 juta. (Widyawati, 2021) .

Di Jawa Timur sendiri, vaksinasi belum mencapai tujuannya di lima wilayah. Menurut data Kementerian Kesehatan per 7 September 2021, sebanyak 33,88% atau 10.782.320 penduduk Jawa Timur pada awalnya divaksinasi dengan vaksin Covid-19. Di sisi lain, 18,94% atau 6.028.117 orang telah divaksinasi untuk kedua kalinya. Target imunisasi untuk penduduk Jawa Timur adalah 31.826.206. Di Jawa Timur yang belum mencapai tujuannya, salah satunya di Kabupaten Sumenep. (Kominfo, 2021).

Vaksinasi di Kabupaten Sumenep berdasarkan data belum mencapai target. Berdasarkan data pelaksanaan vaksinasi sampai tanggal 30 September 2021, dari total sasaran sebanyak 845.130 orang telah tercapai 235.918 orang atau sekitar 27,9%. Dengan rincian 166.184 orang telah melakukan vaksinasi dosis 1 sedangkan 67.638 orang divaksin dosis 2, dan 2.096 orang divaksin dosis 3 para tenaga kesehatan (Tobari, 2021). Ternyata per 14 Oktober hanya 30,4%. Hal yang sama berlaku untuk dosis pertama. Dosis kedua bahkan lebih rendah, yaitu 10,5

persen. Salah satunya di Kecamatan Gapura yang belum mencapai target vaksinasi. (Basri, 2021).

Vaksinasi di Kecamatan Gapura dengan 17 desa dengan jumlah penduduk 32.283 jiwa. Berdasarkan data yang di dapat dari sekretaris Desa Batudinding yaitu bapak Nuril Ubut, data vaksinasi di Kecamatan Gapura pada tanggal Januari 2022 yang telah melakukan vaksinasi sebanyak 17.236 orang. Dengan target vaksinasi 70 persen, ada 3 desa yang sudah mencapai target, yaitu: yang pertama desa Braji sudah melakukan vaksinasi sebanyak 966 orang dengan persentase 70,61 persen, yang kedua desa Poja yang sudah melakukan vaksinasi sebanyak 803 orang dengan persentase 70,56 persen, dan yang ketiga desa Batudinding yang sudah vaksin sebanyak 1.095 orang dengan persentase 70,24 persen. Dari data yang ada 53,39 persen di Kecamatan Gapura sudah memenuhi vaksinasi.



Tabel 1.1
Data Vaksinasi Kecamatan Gapura
Januari 2022

No	Desa	Jumlah Penduduk	Sudah Vaksin	Persentase
1	Braji	1.368	966	70,61%
2	Poja	1.138	803	70,56%
3	Batudinding	1.559	1.095	70,24%
4	Banjar barat	2.045	1.407	68,80%
5	Baban	1.727	1.172	67,86%
6	Banjar timur	1.115	742	66,55%
7	Gapura tengah	1.461	872	59,69%
8	Paloloan	1.966	1.158	58,90%
9	Andulang	2.722	1.559	57,27%
10	Gersik putih	1.027	575	55,99%
11	Karang budi	2.156	1.180	54,73%
12	Mandala	596	310	52,01%
13	Panagan	1.002	521	52,00%
14	Gapura timur	2.097	978	46,64%
15	Gapura barat	3.109	1.382	44,45%
16	Grujugan	3.010	1.316	43,72%
17	Longos	4.185	1.200	28,67%
Jumlah		32.283	17.236	53,39%

Sumber: Diolah 2022

Vaksinasi di Desa Batudinding yang memiliki 3 dusun dengan jumlah penduduk 1.559 orang. Berdasarkan data vaksinasi yang di dapat dari sekretaris Desa Batudinding yaitu bapak Nuril Ubut, data vaksinasi di Desa Batudinding pada tanggal 9 Januari 2022 yang telah melakukan vakinasi dengan data vaksin dosis pertama sebanyak 1.076 orang, dosis kedua sebanyak 800 orang, dan dosis ketiga sebanyak 7 orang. Dari data tersebut masih 69,02 persen yang telah melakukan vaksinasi. Dan data pada tanggal 10 Januari 2022 yang sudah melakukan vaksinasi dengan dosis pertama sebanyak 1.095 orang, dosis kedua sebanyak 800 orang, dan dosis ketiga sebanyak 7 orang. Dari data tersebut 70,24 persen sudah memenuhi vaksinasi.

Tabel 1.2
Data Vaksinasi Desa Batudinding

NO	TANGGAL	VAKSINASI			PERSENTASE
		DOSIS I	DOSIS II	DOSIS III	
1	9 Januari 2022	1.076	800	7	69,02%
2	10 Januari 2022	1.095	800	7	70,24%

Sumber: Diolah 2022

Di Kecamatan Gapura Vaksin Covid-19 awalnya sangat ditakuti oleh masyarakat dikarenakan banyaknya isu yang menyebar di masyarakat. Sama halnya di Desa Batudinding hampir semua masyarakat di Desa Batudinding tidak ingin untuk di Vaksin dikarenakan takut akan isu-isu yang beredar seputar vaksin (*hoax*). Akan tetapi seiringnya waktu dan usaha Pemerintah Desa Batudinding tetap berupaya menyampaikan kepada masyarakat terkait pentingnya Vaksinasi itu sangat berpengaruh masyarakat. upaya tersebut dapat berupa usaha kepala Desa mendatangi ke rumah-rumah warga (*dor to door*) sambil lalu menyampaikan pentingnya vaksinasi covid-19 di era pandemi seperti saat sekarang ini, selain itu, kepala Desa melakukan upaya pendekatan kepada masyarakat dengan cara memanfaatkan kegiatan rutinitas masyarakat (*kompolan*) sebagai ajang untuk mensosialisasikan program vaksinasi yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa. Disamping itu juga, kepala Desa beserta aparat rutin memanfaatkan media sosial seperti ShatsApp dengan men *share* informasi-informasi terkini yang berkaitan dengan vaksinasi sebagai bentuk pendekatan kepada msasyarakat agar sadar akan pentingnya kesehatan publik ditengah pandemi *covid-19*. Dari beberapa upaya kepala Desa tersebut, tingkat vaksinasi di Desa Batudinding dapat meningkat karena pada awalnya masyarakat yang takut di vaksin menjadi tidak takut untuk

ikut serta dalam vaksinasi di Kantor Balai Desa Batudinding. Dan saat ini vaksinasi di Desa Batudinding Kecamatan Gapura sudah terbilang cukup tinggi dan sudah mencapai angka 80 persen orang yang sudah melakukan vaksinasi.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas adapun rumusan masalahnya adalah bagaimanakah Implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19 di Desa Batudinding Kecamatan Gapura?

1.3. Tujuan

Untuk mengetahui Implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19 di Desa Batudinding Kecamatan Gapura.

1.4. Manfaat

1.4.1. Manfaat Teoritis

Untuk menguji teori implementasi kebijakan dan juga dapat dijadikan acuan untuk peneliti berikutnya.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai sumber informasi dan masukan bagi pemerintah terkait implementasi kebijakan vaksinasi covid-19.

1.4.3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat untuk bisa mengetahui Implementasi kebijakan vaksinasi covid-19.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan supaya penulisan penelitian ini dapat terstruktur secara sistematika dan sesuai dengan kaidah ilmiah, sehingga dapat di paparkan secara baik dan memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini dipaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Data diambil dari teori-teori dan fakta empiris yang menjadi acuan dalam penelitian. Fakta yang digunakan berdasarkan topik dalam penelitian yang kemudian dikembangkan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

Pada bab ini membahas teori-teori dan hasil penelitian sebelumnya serta kerangka pikir peneliti. Pada pembahasan ini hasil penelitian terdahulu yang dianalisis letak hasil kebaruannya.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini memaparkan fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, instrumen penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa data dan keabsahan data. Sumber data berasal dari fakta di lapangan dan teori-teori yang menjadi acuan.

Bab ini menjelaskan fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, instrumen penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, dan keabsahan data. Sumber data berasal dari fakta di lapangan dan teori yang menjadi acuan.

BAB IV GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

Pada Bab ini memaparkan terkait kondisi umum desa, visi dan misi, struktur organisasi, sejarah desa, kondisi geografis desa, perekonomian desa, sosial budaya, dan sarana dan prasarana.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini menjelaskan terkait hasil penelitian, analisis hasil penelitian, dan pembahasan yang diperoleh dilapangan.

BAB VI PENUTUP

Pada Bab ini memaparkan kesimpulan dan saran dari secara keseluruhan.

